BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa guna mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, setiap pencipta arsip membuat sistem klasifikasi arsip dinamis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 235);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur Pemerintah Kabupaten;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

3. Arsip ...

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakat dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasian informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
6. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait pelasanaan tugas dan fungsi tertentu.
7. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis.
8. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
9. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
10. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

11. Rahasia ...

11. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi.
12. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan bangsa.
13. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya.
14. Pengguna arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepeningan pengguna arsip yang berhak.
15. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan internal OPD.
16. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hokum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan OPD.
17. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hokum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

19. Unit Kearsipan ...

19. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
20. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dimaksudkan untuk

a. mendorong unit-unit pengolah agar memberkaskan arsip dengan tertib disertai daftar arsip aktifnya;

b. memberikan petunjuk kepada unit-unit pengolah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi yang telah ditetapkan;

c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reabilitas arsip dapat tetap terjaga; dan

d. melindungi arsip dari pengaksesan arsip yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

(2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bertujuan untuk :

a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

b. Memberikan ...

b. memberikan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;
c. tersedianya informasi lembaga kearsipan yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
d. terjaminya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan;
e. terciptannya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mencakup :

a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan eksternal.

BAB IV

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 4

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

b. Keempat tingkat ....

b. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamananya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasi maka semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
c. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
d. Setiap ASN hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
e. Publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 5

Penggolongan personil untuk menjamin perlindungan pengamanan informasi dan mempunyai hak akses arsip dinamis dapat diuraikan sebagai berikut :

a. penentu kebijakan (Pimpinan tertinggi sampai dengan eselon 2 pada instansi pemerintah daerah atau eselon 3 pada unit kerja setingkat Balai/UPT/Kantor)
b. pelaksana kebijakan (Pejabat pada unit pengolah yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi setingkat eselon 3 dan 4)
c. pengawas (Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan).

Pasal 6

(1) Penggolongan pengguna yang berhak mengakses arsip dinamis, yaitu :
    a. Pengguna yang berhak di lingkungan internal
    b. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal
(2) Pengguna di lingkungan internal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a terdiri dari : Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan dan Pengawas internal (Inspektorat kabupaten)

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

(3) Pengguna ...

(3) Pengguna di lingkungan eksternal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b terdiri dari : Publik, Pengawas eksternal (BPK dan BPKP) serta Aparat penegak hukum.

Pasal 7

(1) Pengguna yang berhak atas akses arsip dinamis yang bersifat Biasa/Terbuka berarti semua pengguna di lingkungan eksternal dan internal.

(2) Pengguna yang berhak atas akses arsip dinamis yang bersifat Terbatas, Rahasia dan Sangat Rahasia hanya dapat diakses oleh Penentu kebijakan, Pengawas Internal dan Eksternal dan Penegak hukum.

Pasal 8

(1) Pengamanan arsip yang bersifat Biasa/Terbuka maka bentuk arsip konvensional tidak ada persyaratan dan prosedur khusus, dan untuk bentuk arsip media baru arsip perlu diback-up secara teratur dengan tujuan pemulihan system dalam rangka menjamin autentisitas arsip.

(2) Pengamanan arsip yang bersifat Terbatas untuk bentuk arsip konvensional perlu memberikan cap "Terbatas" pada fisik arsip, sedangkan untuk bentuk arsip media baru disamping prosedur seperti arsip biasa/terbuka diperlukan upaya perlindungan file-file elektronik dari pengguna internal maupun pihak eksternal.

(3) Pengamanan arsip yang bersifat Rahasia untuk bentuk arsip konvensional dengan memberikan cap Rahasia pada fisik arsip dan tidak meletakan arsip yang bersifat rahasia, sedangkan untuk bentuk arsip media elektronik dengan melakukan back-up secara teratur dengan tujuan pemulihan system dalam rangka menjamin autentisitas arsip dan melakukan upaya perlindungan file-file elektronik dari pengguna internal maupun pihak eksternal.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

(4) Pengamanan arsip ...

(4) Pengamanan arsip yang bersifat Sangat Rahasia untuk arsip konvensional dengan memberikan cap Sangat Rahasia pada fisik arsip, sedangkan untuk bentuk arsip media elektronik dengan melakukan back-up secara teratur dengan tujuan pemulihan system dalam rangka menjamin autentisitas arsip dan melakukan upaya perlindungan file-file elektronik dari pengguna internal maupun pihak eksternal.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA PENYIMPAN ARSIP
Pasal 9

(1) Sarana dan prasarana penyimpan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggunakan sarana perangkat keras (hardware) dan sarana perangkat lunak (software).

(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. sarana penyimpan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
   b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
   c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.

(3) Perangkat lunak (Software) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
   b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

Pasal 10 ...

Pasal 10

(1) Prasarana dan sarana pengamanan arsip dengan tingkat klasfikasi Biasa/Terbuka maka untuk arsip konvensional tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus dan untuk arsip media elektronik juga tidak memerlukan parasana dan sarana khusus.

(2) Prasarana dan sarana pengamanan arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas maka untuk arsip konvensional diperlukan tempat penyimpanan yang aman dan untuk arsip media elektronik dengan autentifikasi server, melakukan langkah keamanan operating system khusus, melakukan firewall dan sistem dan prosedur terhadap intrusi.

(3) Prasarana dan sarana pengamanan arsip dengan tingkat klasifikasi Rahasia maka untuk arsip konvensional lokasi aman dengan akses yang terbatas dan untuk arsip media elektronik dengan melakukan langkah keamanan operating system khusus, melakukan firewall dan sistem dan prosedur terhadap intrusi.

(4) Prasarana dan sarana pengamanan arsip dengan tingkat klasifikasi Sangat Rahasia maka untuk arsip konvensional disimpan dalam zona yang sangat aman dengan penelusuran jejak akses dan penerapan kebijakan "Meja harus bersih" dan untuk arsip media elektronik dengan melakukan autentifikasi server, langkah-langkah keamanan dengan Operating Sytem khusus dan Firewall dan sistem serta prosedur deteksi terhadap intrusi.

Pasal 11

(1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (*CCTV*), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

(2) Pengamanan ...

(2) Pengamanan arsip kategori Biasa/Terbuka disimpan pad arak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filling cabinet,* dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

BAB V

PROSEDUR PENGIRIMAN INFORMASI ARSIP

Pasal 12

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini juga mengatur tata cara Penyampaian Informasi Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sesuai tingkat klasifikasi keamanan sebagai berikut :

a. prosedur pengiriman informasi arsip yang bersifat Biasa/Terbuka untuk arsip konvensional dan arsip elektronik tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.
b. prosedur pengiriman informasi arsip yang bersifat Terbatas untuk arsip konvensional amplop arsip harus disegel, dan untuk arsip elektronik harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, password dan lain-lain.
c. prosedur pengiriman informasi arsip yang bersifat Rahasia dan Sangat Rahasia untuk arsip konvensional menggunakan warna kertas yang berbeda, diberi kode rahasia diamplop arsip harus disegel dan distempel Rahasia atau Sangat Rahasia, menggunakan amplop dobel, melakukan audit jejak untuk setiap titik akses dan harus dikirim melalui orang yang suda diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip rahasia/sangat rahasia.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

d. Prosedur ...

d. Prosedur pengiriman arsip yang berifat Rahasia dan Sangat Rahasia untuk arsip elektronik harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik, menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi email rahasia/sangat rahasia, menggunakan persandian (kriptografi) dan harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektonik (email).

BAB VI

DAFTAR ARSIP DINAMIS SESUAI SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN ARSIP DINAMIS

Pasal 13

Daftar arsip dinamis yang sesuai dengan Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGELOLA ARSIP DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Pasal 14

(3) Setiap pimpinan OPD menunjuk ASN di lingkungan unit kerja sebagai pejabat pengelola informasi publik;

(4) Setiap pimpinan OPD menunjuk ASN di lingkungan unit kerjanya sebagai pengelola arsip dinamis unit kearsipan serta menunjuk pengelola arsip pada setiap unit pengolah.

(5) Pejabat pengelola informasi publik dapat merangkap sebagai pengelola arsip di unit kearsipan.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akese Arsip Dinamia berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KABAG HUKUM	

BAB VIII ...

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 3 Maret 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1185

Lampiran - PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TANGGAL 3 MARET 2025

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000	**UMUM**				
	000.1	**KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN**				
	000.1.1	Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
	000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri				
	000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain : Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.5	Rapat pimpinan antara lain : Notula/Risalah Rapat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.1.6	Penyediaan Konsumsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas				
	000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor				
	000.1.8.1	Pertamanan/Landscape	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8.2	Penghijauan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8.3	Perbaikan Gedung	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/Wisma	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.9.1	Perbaikan/Pemeliharaan				
	000.1.9.2	Pemasangan				
	000.1.10	Ketertiban dan Keamanan				

000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya.	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2	**PERLENGKAPAN**				
	000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan				
	000.2.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.2.1	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.2.2	Pemeliharaan dam peralatan kantor				
	000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2.3	Distribusi				
	000.2.3.1	Barang habis pakai	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.2.3.2	Barang milik daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain : Keputusan pembentukan tim, Berita acara penghapusan barang milik daerah, Daftar barang yang dihapuskan, Laporan hasil pelaksanaan penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan.	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.3	PENGADAAN				
	000.3.1	Rencana pengadaan Barang dan Jasa (antara lain : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan).	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain : persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain : persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatangan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

000.3.4 Swakelola ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.3.4	Swakelola (antara lain : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/Jasa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.3.6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain : Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4	**PERPUSTAKAAN**				
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka				
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekam	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.3	Koleksi Pustaka				
	000.4.3.1	Pembelian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.2	Hibah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

000.4.3.3 Hadiah ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.4.3.3	Hadiah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.4	Tukar Menukar	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.6	Terbitan Internal	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.6	Layanan Perpustakaan				
	000.4.6	Keanggotaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6	Peminjaman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6	Pengembangan gemar baca	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.7	Kerjasama Perpustakaan				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.4.7.1	MoU	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan				
	000.4.8.1	Pengembangan situs web	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.10	Konservasi				
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

000.4.11 Reprofill ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.4.11	Reprofilm (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.12	Transformasi Digital	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.13	Kurasi Digital	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan				
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5	KEARSIPAN				
	000.5.1	Kebijakan di bidang Kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan				
	000.5.2.1	Pengembangan profesi arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain : Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain : Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain : Berkas Penyelenggaraan pemilihan lembaga/unit kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain : Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis				
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain : Buku Registrasi naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain : daftar berkas dan daftar isi berkas)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain : daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain : daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)	Biasa/Terbuka	Eselon II	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.3.5	Autentifikasi Arsip Dinamis (antara lain : pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian penetapan autentisitas arsip dinamis)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain : Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain : Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Auntentik Arsip Terjaga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.6	Penyusutan Arsip				
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain : Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain : SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya10 tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku pimpinan pencipta arsip untuk memusnahkan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun, Penetapan Arsip yang dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip yang Dimusnahkan.	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain : Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain : Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alihmediakan)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif				
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif				
	000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis				
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain : Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Persetujuan untuk penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan, Berita acara penyerahan, Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain : Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawacara, Laporan Kegiatan, Hasil wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain : pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.6	Preservasi preventif (antara lain : penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.7	Preservasi kuratif	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.8	Autentifikasi Arsip Statis (antara lain : pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain : Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.12	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.13	Penyelamatan arsip perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.15	Pengawasan Kearsipan				
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.5.15.3	Sanksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.6	**PERSANDIAN**				
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.2	Pengamanan persandian				
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal : teknik sandi dan kripto	Sangat Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan/atau keselamatan	Unit pengolah terkait

000.6.2.2 Analisis Sinyal ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.6.2.2	Analisis sinyal : teknik sandi dan kripto	Sangat Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan/atau keselamatan	
	000.6.2.3	Materiil sandi : sistem dan peralatan	Sangat Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan/atau keselamatan	
	000.6.3	Pengkajian persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi				
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	Sangat Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan/atau keselamatan	Unit pengolah terkait
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	Sangat Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan/atau keselamatan	Unit pengolah terkait
	000.6.3.3	Pelaksanaan	Sangat Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan/atau keselamatan bangsa.	Unit pengolah terkait
	000.6.3.4	Pelaporan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian				
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.4.2	Jaringan Komunikasi	Sangat Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan/atau keselamatan bangsa.	Unit pengolah terkait
	000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik				
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

000.6.5.7 Pelaporan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.6.5.7	Pelaporan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7	**PERENCANAAN**				
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang				
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.1.6	Musrenbang Desa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah				
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.6	Program Kerja Tahunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.7	Penetapan/Kontrak Kinerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.8	Laporan Berkala	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.9	Laporan Insidential	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.2.10	Evaluasi Program	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Peniaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah				
	000.7.6.1	Rencana awal perencanaan aksi strategi daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.6.5	Penetapan perencanaan aksi strategi daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan				

000.7.7.1 Pendanaan Nasional ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.8	**ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**				
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.2	Uraian Jabatan				
	000.8.2.1	Ketatalaksanaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.2.2	Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.2.3	Evaluasi Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.8.2.4	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9	**PENELITIAN, PENGAJIAN, DAN PENGEMBANGAN**				
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembanan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi : rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.9.3	Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian, dan pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	000.9.6.1	Data	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.6.2	Statistik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				

000.9.8 HaKI ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	000.9.8	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.9.10	Seminar, lokakarya, temukarya, workshop	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100	**PEMERINTAHAN**				
	100.1	**OTONOMI DAERAH**				
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.1.5	Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.1.6	Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				
	100.1.6.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.1.6.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	100.1.6.3	Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.1.7	LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.2	**PEMERINTAHAN UMUM**				
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama				
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentarasi dan Tugas Pembantuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan				
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait

100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Pemerintah Pusat
	100.2.3.3	Batas Daerah Wilayah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait
	100.2.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait
	100.3	**HUKUM**				
	100.3.1	Program Legislasi				
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.1.2	Program Legislasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk Naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah				
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.4	Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.5	Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.6	Keputusan Sekretariat Daerah Kota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

100.3.4 Instruksi/Surat Edaran ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Bupati	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Walikota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.5	Surat Perintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MOU)/Kontrak/Perjanjian kerja sama				
	100.3.7.1	Dalam Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.7.2	Luar Negeri	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait
	100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

100.3.10 Bantuan/Konsultasi Hukum ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian bantuan/Konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.11	Kasus/Sengketa Hukum				
	100.3.11.1	Pidana Kasus/Sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.11.2	Perdata Kasus/Sengketa perdata	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.11.4	Perburuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.11.5	Arbitrase	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.11.6	Sengketa Adat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.12	Perijinan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

100.3.13.1 Hak Cipta ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	100.3.13.1	Hak Cipta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.13.2	Hak Paten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.13.3	Hak Desain Industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.13.5	Hak Merk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	100.3.14	Permohonan HAKI yang ditolak	Biasa/Terbuka		Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolahan terkait
	200	**POLITIK**				
	200.1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
	200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.2.3	Bela Negara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.3	Kewaspadaan Nasional				
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Sangat Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, keutuhan wilayah NKRI dan/atau keselamatan bangsa.	Pemerintah Pusat

200.1.3.2 Fasilitas Bina Masyarakat ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolahan terkait
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan				
	200.1.4.1	Ketahanan Seni	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.6	Fasilitasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.5	Politik Dalam Negeri				
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

200.1.5.2 Fasilitas Kelembagaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang Memperoleh Kursi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.5.5	Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.5.6	Pemerintah Pusat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.5.7	Database Parpol	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.5.9	Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.6	Ketahanan Ekonomi				
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2	**PEMILU**				
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih				
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilik (DP4) Pemilu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

200.2.2.4 Keputusan KPU ..

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu				
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perorangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu				
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang Penetapan daerah pemilihan dab jumlah kursi Anggota DPR	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.5	Pencalonan Pemilu				
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.5.3	Daftar bakal calon	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.6	Kampanye Pemilu				
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

200.2.6.3 Peringatan tertulis ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.7	Dana Kampanye				
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye	Biasa/Terbuka	Eselon III	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara				
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.8.2	Master surat suara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak Terpakai (rusak, salah dan tidak digunakan)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu				
	200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu				
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	200.2.11	Laporan hasil Penyelenggaraan Pemilu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300	**KEAMANAN / KETERTIPAN**				
	300.1	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**				
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

300.1.2 Tata Operasional ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja				
	300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.1.4	Perindungan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	300.2	**PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN**				
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan				
	300.2.2.1	Rencana dan standarisasi dan pengawakan dan perbekalan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	300.2.2.5	Perencanaan dan standarisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.2.6	Registrasi BEACON	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolahan terkait
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyaratan				

300.2.5.1 Rencana Pendidikan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	300.2.5.4	Pemasyarakatan pencarian dan pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standarisasi Komunikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.8	Operasi Komunikasi				
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.8.3	Registrasi BEACON	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi				
	300.2.12.1	Laporan Harian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.12.2	Laporan Bulanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

300.2.12.2 laporan Tahunan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	300.2.12.3	Laporan Tahunan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	300.2.12.4	Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	400.1	**PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**				
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya				
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur				

400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha				
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.1.4.14 Fasilitasi kerja ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya				
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus				
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.1.6.7 Pemantauan dan Evaluasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum				
	400.2.2.1	Data gender	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)				
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.2.3.6 Analisis dan Penyajian ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)				
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.4.2	Data perlindungan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)				
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.2.5.3 Data tmbuh Kembang anak ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3	**PENDIDIKAN**				
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.2.4	Block grant	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat				
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.3.3	Pembinaan Program	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.3.3.5	Pameran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.3.3.6	Rakor	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.3.7	Sosialisasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.3.4 Kursus/Pelatihan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama				
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.5.2	Block grant	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus				
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.6.2	Block grant	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.6.3	Lomba, festival	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.3.6.4	Pendataan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.6.5	Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.3.7 Pembinaan Pendidik ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik				
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.7.7	Block grant	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.8	Sekolah Menengah Atas				
	400.3.8.1	Kurikulum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.8.2	Bahan ajar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.8.3	Pelatihan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400..3.8.4 Block Grant ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.3.8.4	Block grant	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus				
	400.3.9.1	Bahan ajar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.9.3	Block grant	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.3.9.8 Pendataan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.3.9.8	Pendataan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik				
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.10.3	Setifikasi Guru	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.10.7	Block grant	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.3.11	Penilaian Pendidikan				
	400.3.11.1	Penilaian Akademik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.3.11.2 Penilaian Nom Akademik ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.3.11.2	Penilaian Non Akademik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan				
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan				
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4	**KEOLAHRAGAAN**				
	400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan				
	400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.4.2.3 Olahraga Pendidikan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi				
	400.4.3.1	Olahraga Massal	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.4.3.2	Olahraga Tradisional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga				
	400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.4.3	Olahraga Prestasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus				
	400.4.5.1	Olahraga Tradisional	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.5.2	Layanan Khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga				
	400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga				

400.1.7.1 Pembibitan Olahraga ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.4.7.2	Kompetisi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.4.7.3	IPTEK Olahraga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan				
	400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga				
	400.4.9.1	Industri Olahraga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.4.9.2	Promosi Olahraga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.4.10	Olahraga Prestasi				
	400.4.10.1	Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.10.2	Nasional	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.10.3	Internasional	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga				
	400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.4.11.3 infrastruktur ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5	**KEPEMUDAAN**				
	400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda				
	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.2.3	Pengembangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda				
	400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda				
	400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni Kepemudaan)				
	400.5.5.1	Pengkajian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.5.2	Pengembangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda				

400.5.6.1 Kepemimpinan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.5.6.1	Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.7	Kewirausahaan				
	400.5.7.1	Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.7.2	Pengaderan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.7.3	Organisasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan				
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda				
	400.5.9.1	Standardisasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda				

400.5.10.1 Kemitraan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.5.10.1	Kemitraan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6	**KEBUDAYAAN**				
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman				
	400.6.2.1	Registrasi Nasional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.2.2	Pelindungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman				
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya				
	400.6.4.1	Sejarah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.6.4.2	Pemetaan nilai	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya				
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.5.2	Kekayaan budaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

400.6.5.3 Warisan Budaya ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.6.5.4	Diplomasi budaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.7	**KESEHATAN**				
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar				
	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.9	Pembiayaan darah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasion	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.7.2.11 Unit Transfusi darah ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan				
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.7.3.7 Fasilitas Pelayanan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik				
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan				
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.7.5.2 Patologi dan Toksilogi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.5.3	Radiologi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.6	Kesehatan Jiwa				
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.7.6.5 Etikolegal ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra				
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.7.2	Imunisasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.7.4	Kesehatan matra	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung				
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.7.8.5 Pengendalian ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang				
	400.7.9.1	Pengendalian malaria	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular				
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.10.3	Penyakit kanker	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.7.11 Penyehatan Lingkungan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.11	Penyehatan lingkungan				
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.11.6	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.12	Gizi				
	400.7.12.1	Gizi makro	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.12.2	Gizi mikro	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.12.3	Gizi klinik dan diatetik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.12.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.7.12.5	Kewaspadaan gizi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.13	Kesehatan ibu				

Kesehatan Ibu Hamil ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.13.1	Kesehatan ibu hamil	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.13.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.13.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.13.4	Keluarga berencana	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.13.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.14	Kesehatan anak				
	400.7.14.1	Kelangsungan hidup bayi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.14.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.14.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.14.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.15	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer				

400.7.15.1 Kesehatan Tradisional ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.15.1	Kesehatan tradisional keterampilan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.15.2	Kesehatan tradisional ramuan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.15.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.15.4	Penapisan dan kemitraan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.16	Kesehatan kerja dan Olah raga				
	400.7.16.1	Pelayanan kesehatan kerja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.16.2	Kapasitas kerja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.16.3	Lingkungan kerja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.16.4	Kemitraan kesehatan kerja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.16.5	Kesehatan perkotaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.16.6	Kesehatan olahraga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.17	Obat Publik dan perbekalan kesehatan				

400.7.17.1 Harga Obat Publik ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.17.1	Harga obat publik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.17.2	Pengadaan obat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.17.3	Perbekalan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.18	Produksi dan distribusi alat kesehatan				
	400.7.18.1	Alat kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.18.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan c	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.18.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.19	Kefarmasian				
	400.7.19.1	Pelayanan kefarmasian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.19.2	Farmasi klinis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.19.3	Farmasi Komunitas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.19.4	Penggunaan obat rasional	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.20	Produksi dan distribusi kefarmasian				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.20.1	Obat tradisional	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.20.2	Kosmetik dan makanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.20.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.20.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.21	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan				
	400.7.21.1	Surat keterangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.21.2	Sertifikasi dan perijinan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.22	Penanggulangan Krisis Kesehatan				
	400.7.22.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.22.2	Tanggap darurat dan pemulihan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.22.3	Pemantauan dan informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.22.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.7.22.5 Pelayanan kesehatan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.22.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.23	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan				
	400.7.23.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.23.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.24	Intelegensia Kesehatan				
	400.7.24.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.24.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.25	Kesehatan Haji				
	400.7.25.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.25.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.26	Promosi Kesehatan				
	400.7.26.1	Sarana Promosi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.7.26.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.7.26.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.7.26.4	Hari Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.7.27	Data dan Informasi				
	400.7.27.1	Statistik kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.7.27.2 Analisis dan iseminasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.27.2	Analisis dan diseminasi informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.27.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.28	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen				
	400.7.28.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.28.2	Standardisasi tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.28.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.28.4	Obat Asli Indonesia	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.29	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya				
	400.7.29.1	Penilaian keamanan pangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.29.2	Standardisasi produk pangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.29.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.7.29.5 Pengawasan Produk ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.7.29.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.7.30	Rekam Medis	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit pengolah terkait
	400.8	**AGAMA DAN KEPERCAYAAN**				
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.8.2	Fasilitasi				
	400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Keperca	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.8.2.4	Kasus Keagamaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME				
	400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9	**SOSIAL**				

400.9.1 Kebijakan di bidang ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak				
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial				
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial				
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban traffking perempuan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia				
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial				
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				

400.9.10.1 Kesiapsiagaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.10.4	Kerjasama	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.11	Jaminan Sosial				
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.11.4	Kerjasama	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial				
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil				
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan				
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.14.5	Bantuan Langsung	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

400.9.15 Kepahlawanan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial				
	400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.10	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**				
	400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
	400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.10.3.3 Pendataan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				
	400.10.4.1	Budaya Nusantara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat				
	400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.10.5.3 produksi dan Pemasaran ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertingga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan				
	400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.11	**PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**				
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.11.2	Pertamanan				

400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.11.2.2	Taman Kota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.11.3	Pemakaman				
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.11.3.2	Pemakaman	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.11.4	Jalur Hijau				
	400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.11.7	Pengelolaan Data	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**				
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk				

400.12.2.1 Identitas Penduduk ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.12.2.1	Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara Dalam Wilayah NKRI	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.3	Pencatatan Sipil				
	400.12.3.1	Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.3.2	Kelahiran dan Kematian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				

400.12.4.1 Sistem Informasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan				
	400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.5.2	Kualitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.6	Penyerasian Kependudukan				

400.12.6.1 Indikator Kependudukan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.12.6.1	Indikator Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13	**KELUARGA BERENCANA**				
	400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
	400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
	400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.13.4 Profil dan Proyeksi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk				
	400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk				
	400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk				
	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.7	Pengembangan Sistem				
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.8	Pengembangan Materi				
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.9	Monitoring dan Evaluasi				

400.13.9.1 Monitoring dan evaluasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.10	Analisis Sosial	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.11	Analisis Ekonomi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Kear	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah				
	400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.13.17 Bina Keluarga ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta				
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan				
	400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan				
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria				
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.13.22.2 Peningkatan Kapasitas ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.26	Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak				
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak				
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.28	Pelembagaan bina ketahanan remaja				
	400.13.28.1	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.13.28.2 pelembagaan bina ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.13.28.2	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja				
	400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.31	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
	400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
	400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.13.33 Pengembangan program ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga				
	400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.38	Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
	400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
	400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.13.39.2 Evaluasi dan Pelaporan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				
	400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.41	Advokasi dan pencitraan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi				
	400.13.42.1	Promosi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.46	Tenaga Lini Lapangan				
	400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan				
	400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan				
	400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan				
	400.13.49.1	Perumusan pola sistempencatatan dan pelapo	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.51	Analisis dan evaluasi				
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data				
	400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.52.2	Pengelolaan bank data	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi				
	400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi				
	400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14	**HUBUNGAN MASYARAKAT**				
	400.14.1	Keprotokolan				

400.14.1.1 Penyelenggaraan acara ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.3	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.4	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan				
	400.14.4.1	Kliping koran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.4.2	Brosur /Leaflet/poster /plakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.4.3	Pengumuman /pemberitaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.8	Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.10	Pameran/sayembara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500	**PEREKONOMIAN**				
	500.1	**KETAHANAN PANGAN**				
	500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				
	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.2.2	Akses Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.1.2.3 Kerawanan Pangan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.1.2.3	Kerawanan Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.2.4	Distribusi dan Cadangan Pangan				
	500.1.2.5	Distribusi Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.2.6	Harga Pangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.1.2.7	Cadangan Pangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.1.3	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan				
	500.1.3.1	Konsumsi Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.3.2	Penganekaragaman Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.3.3	Keamanan Pangan Segar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.4	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan				
	500.1.4.1	Dewan Ketahanan Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.4.2	Penghargaan Ketahan Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.5	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.6	Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.1.7	Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2	**PERDAGANGAN**				
	500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri				
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.2.2.5 Pelaku Pasar ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.2.2.5	Pelaku Pasar	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.14	Informasi Pasar	Rahasia	Eselon II	Apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.16	Barang Strategis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.2.3.3 Perumusan dan Penerapan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.4	Tata usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.11	Jasa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.12	Kerjasama	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.2.3.14 kelembagaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.16	Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi				
	500.2.4.1	Pengkajian pasar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.4.4	Pengkajian pasar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.2.4.6 Sistem Informasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.2.4.6	Sistem informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.2.5	Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.2.6	Evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3	**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**				
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM				
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.2.2	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.3	Produksi				
	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.4	Pembiayaan				
	500.3.4.1	Program Pendanaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.3.4.2 Pengembangan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.3.4.2	Pengembangan dan Pengedalian Simpan Pinjam	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.4.3	Urusan Permodalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha				
	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.6.5	Advokasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha				
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK				
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.8.2	Penelitian UKM	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.3.9 Kerja sama ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga				
	500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4	**KEHUTANAN**				
	500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.2	Penyuluhan				
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.2.3	Program Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.2.5	PengembanganTenaga Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.2.8	Deseminasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3	Planologi Kehutanan				
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.4.3.5 Perubahan fungsi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.12	Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan				
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.4.4.2 SK ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.3	Kerjasama	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.5	Perpanjangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.7	Investasi Industri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.8	Peralatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.9	Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.10	Pemegang Saham	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.412	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.4.4.14 Rencana Karya ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.17	Produksi Kayu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.18	Produksi non kayu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.21	Industri Non Kayu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.4.4.25 pemblokiran ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.4.4.25	Pemblokiran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.26	Denda	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.4.4.46 Pengendalian bahan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan				
	500.4.5.1	Standardisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan	Terbatas			
	500.4.5.3	Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.4.5.10 Pas Angkutan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terbatas			
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam	Terbatas			
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial				
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.2	Kebun Benih	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.4.7.3 Tegakan Benih ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.4.7.3	Tegakan Benih	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.4	Pengadaan Benih	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.7	Pembibitan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.8.3	Diseminasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.4.8.4	Gelar Teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.4.8.5 Forum Komunikasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2	Perikanan Tangkap				
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikana	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap I	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.14	Kenelayanan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3	Perikanan Budidaya				
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air	Terbatas			
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.5.3.5 informasi dan Distribusi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.2	Pengembangan Produk	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.4	Industri Pengolahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Kons	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.8	Pengembangan Industri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.5.4.10 Kelembagaan dalam negeri ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Terbatas			
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Nege	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.18	Pengembangan Impor	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri Pelayanan Usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.20	Kemitraan Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.21	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.22	Investasi dan Permodalan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.4.23	Informasi dan Promosi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.5.5.17 Akses Pemodalan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.5.5.17	Akses Permodalan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa dan Sumber Daya Non Haya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.5.6.10 Logistik ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelau	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.17	Penyidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7	Karantina Ikan				
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.5.7.2 Penahanan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.5.7.2	Penahanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.3	Pengasingan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.4	Pengamatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.5	Pengakuan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.6	Penolakan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.7	Pemusnahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.14	Surat Perintah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.15	Rekomendasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.5.7.21	Lokasi Karantina	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6	**PERTANIAN**				
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.2	Perlindungan hortikultura				
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.6.2.4 Dampak iklim ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura				
	500.6.3.1	Penilaian Varietas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan				
	500.6.4.1	Basis Data Lahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi				
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.5.4	Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian				
	500.6.6.1	Pembiayaan Program	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.7	Pupuk Pestisida				
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.6.7.2 pupuk organik ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.7.3	Pestisida	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian				
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan				
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Ben	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.10	Budidaya Serealia				
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.10.3	Jagung	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.10.4	Serealia Lain	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi				
	500.6.11.1	Kedelai	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.11.2	Ubi Kayu	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.11.3	Aneka Kacang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.11.4	Aneka Umbi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.12	Perlindungan Tanaman Pangan				
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan				
	500.6.13.1	Padi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.6.13.3 Kedelai ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.13.4	Aneka Umbi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian				
	500.6.14.1	Tanaman Pangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.14.2	Holtikurtura	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.14.3	Perkebunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.14.4	Peternakan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.15	Mutu dan Standariasi				
	500.6.15.1	Standardisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi				
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.16.2	Investasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.17	Pemasaran Domestik				
	500.6.17.1	Informasi Pasar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.6.20 Disemasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.6.20	Diseminasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian				
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.26	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)				
	500.6.26.1	Hak Cipta	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.26.4	Hak Merek	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian				
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.6.28 Pelayanan Hukum ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.6.28	Pelayanan Hukum				
	500.6.28.1	Sertifikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.29	Karantina Pertanian				
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.29.2	Karantina Hewan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.6.30	Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.6.31	Evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.7	**PETERNAKAN**				
	500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan				
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.7.2.2	Pakan Ternak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.7.2.3	Budidaya Ternak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.7.3	Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.7.4	Evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8	**PERKEBUNAN**				

500.8.1 Kebijakan di Bidang ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.2	Tanaman Semusim				
	500.8.2.1	Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.2.3	Teknologi dan Budidaya Tanaman Semusim	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar				
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.4	Tanaman Tahunan				
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan				
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.5.2	Identifikasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha				
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.8.8	Evaluasi Perkebunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9	**PERINDUSTRIAN**				
	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.9.2 Iklim Usaha ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama				
	500.9.2.1	Industri Manufaktur	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.2.2	Industri Agro	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.3	Promosi Industri				
	500.9.3.1	Industri Manufaktur	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.4	Standarisasi dan Teknologi				
	500.9.4.1	Industri Manufaktur	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.4.2	Industri Agro	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.4.3	Teknologi Tinggi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual				
	500.9.5.1	Industri Manufaktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.9.5.2	Industri Agro	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.9.5.3	Teknologi Tinggi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.9.6	Industri Hijau				
	500.9.6.1	Industri Manufaktur	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.6.2	Industri Agro	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.9.7 Analisis Kerja Sama ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.12	Standarisasi				
	500.9.12.1	Standar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri				
	500.9.13.1	Kebijakan Industri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup				
	500.9.14.1	Industri Hijau	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.14.2	Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.14.3	Energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual				
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				
	500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.2	Rekomendasi Kegeologian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.10.2.1 Mitasi gunung Api...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.2.3	Pertambangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.2.4	Panas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.2.5	Geosains	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.3	Penelitian Kegeologian				
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalib	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.3.9	Survei Geologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian				
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.4.4	Survei Geologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.4.5	Konservasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi				
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.10.5.3 Mitasi Bencana ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunung api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.5.4	Survei Geologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.6.4	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.7.3	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.7.7	Partisipasi Interest	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9	Teknik dan Lingkungan				
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (POR)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.9.10	Usaha penunjang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				

500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi				
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12	Panas Bumi				
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SI	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.1	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.1	Penetapan kapasitas usaha panas bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.1	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.1	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.12.1	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.1	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.1	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.12.1	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas E	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.13	Bioenergi				
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.14	Aneka Energi				
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.15	Konservasi Energi				
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.10.15.8 Profil Investasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.15.1	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE				
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik				
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan				
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan				
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.10.19.4 Perlindungan Lingkungan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan,Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.20	Sertifikasi				
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.22	Standarisasi Kompetensi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.23	Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan				
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.24	Standarisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan				
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara				
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.10.25.6 Perencanaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral				
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.1	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.1	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.1	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.1	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.1	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.1	Pelaporan usaha pertambangan mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.1	Penghargaan usaha pertambangan mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.26.1	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara				
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.10.27.5 Laporan/Data ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.1	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.1	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.1	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.1	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.1	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.1	Pelaporan usaha pertambangan batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.1	Penghargaan usaha pertambangan batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.27.1	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.28	Penerimaan Negara				
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNB	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara				
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMD/	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.10.29.7 Upaya Pengelolaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL- 5) pelaksanaan reklamasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Pengawasan lingkungan pertambangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Pengawasan Teknis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.29.1	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan				
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan /inovasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/ Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.10.30.9 master proceeding ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.1	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.1	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.1	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.30.1	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.31	Sarana Litbang				
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.32	Afiliasi				
	500.10.32.1	Proyek Percontohan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.32.4	Penyajian Informasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian				
	500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan Kewilayahan pantai	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.33.4	Penelitian sumber Daya mineral kelautan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi				
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.10.34.2 Teknologi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.34.3	Laboratorium	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.34.4	Study	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.34.5	Teknologi Proses	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.34.7	Teknologi Gas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara				
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan				
	500.10.36.1	Energi baru terbarukan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11	**PERHUBUNGAN**				
	500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan				
	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.11.2.5 Jaringan trayek ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan				
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor				
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor				
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.7	Perlengkapan Jalan				
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbang kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.8	Angkutan Penumpang				
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.11.8.3 Izin Trayek ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.8.7	Angkutan perintis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.9	Angkutan Barang				
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.10	Monitoring Operasional				
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
	500.11.11.1	Pedoman Teknis	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.11.3	Bimtek PPNS	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.11.13.2 Pengembangan Sistem ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.18.1	Manajemen lalu lintas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.21	Tarif dan Keperintisan				
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan				
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.11.22.3 Transportasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan				
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.24	Angkutan Perkotaan				
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.25	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan				
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan				
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan				
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.28	Pengembangan Keselamatan				
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan				

500.11.29.1 Promosi Keselamatan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum				
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.31	Audit Keselamatan				
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.32	Inspeksi Keselamatan				
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.33	Parkir				
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.12	**KOMUNIKASI DAN INFORMATINA**				
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.2	Telekomunikasi				
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.12.2.4 Kelayakan Sistem ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.3	Penyiaran				
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal				
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.5	Pengendalian Informatika				
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomuni	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.6	e- Government				
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.7	e- Business				
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Busir	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Busniness	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.12.8 pemberdayaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat				
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkot	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika				
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.10	Keamanan Informasi				
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.12.10.5 Budaya Keamanan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.11	Komunikasi Publik				
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi				
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.13	Pengelolaan Media Publik				
	500.12.13.1	Media Cetak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.12.13.2	Media Online	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.12.14	Kemitraan Komunikasi				
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.12.14.3 Kemitraan Organisasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.14.4	Infrastruktur Informatika	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.14.5	Jaringan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.14.6	Piranti Teknologi Informatika	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.14.7	Keamanan Informatika	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.15	Sistem dan Data				
	500.12.15.	Portal dan Konten	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.15.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.15.	Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.16	Pusat Kerjasama				
	500.12.16.1	Kerja Sama Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.16.2	Kerja Sama Bilateral	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.17	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.12.17.1	Pelayanan Informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.17.2	Hubungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.12.18	Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.13	**PERIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				
	500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata				
	500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.2.3	Industri Pariwisata	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.13.3	Pemasaran Pariwisata				
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya				
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.14	**STATISTIK**				
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi				
	500.14.2.1	Perencanaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada takeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.14.2.4 Pengolahan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, Pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.3	Survei				
	500.14.3.1	Perencanaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.3.2	Persiapan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.4	Konsolidasi Data Statistik				
	500.14.4.1	Kompilasi Data	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.4.2	Analisis data	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15	**KETENAGAKERJAAN**				
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja				
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.15.4 Bina Lembaga ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan				
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.6	Bina Pemagangan				
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan				
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja				
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.8.3	Bursa Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.8.4	Analisis Jabatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
	500.15.9.1	Antar Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.15.10 Peluasan Kesempatan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.11	Standarisasi Profesi				
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi				
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial				
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
	500.15.14.1	Pengupahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial				
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaandan Tenaga Penyelesaian Perselisiha Hubungan Industrial	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.15.16.3 Pengawasan Norma ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak				
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.20	Bina Penegakan Hukum				
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.20.	Kerjasama Penegakan Hukum	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.16	**PENANAMAN MODAL**				
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal				
	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyulu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.16.3.6 Pemberdayaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.4	Promosi Penanaman Modal				
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.4.4	Promosi Sektoral	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal				
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				

500.16.6.1 Pemantauan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.6.5	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal				
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.17	**PERTANAHAN**				
	500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi				
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

500.17.2.2 Pembinaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas				
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.17.4.4	Sengketa Tanah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.17.4.5	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.17.4.6	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18	**TRANSMIGRASI**				
	500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi				
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.18.2.4 Advokasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi				
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi				
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi	Biasa/Terbuka			
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.5	Partisipasi Masyarakat				
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi				
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.18.6.2 Bina Sistem ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat				
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.8	Pengembangan Usaha				
	500.18.8.1	Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.8.2	Produksi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan				
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

500.18.9.3 pengembangan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasaran	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.10	Penyerasian Lingkungan				
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600	**PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**				
	600.1	**PEKERJAAN UMUM**				
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air				
	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.2.2	Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

600.1.2.5 pengaturan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air				
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.3.2	Manajemen Mutu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air				
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Em	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)				
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

600.1.6.3 pelaksanaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan				
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.8	Pembangunan Jalan				
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.9	Preservasi Jalan				
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

600.1.9.4 Teknik Penglihatan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.10	Pengelolaan Jembatan				
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.10.3	Teknik Jembatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah				
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.12	Pengaturan Jalan Tol				
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman				

600.1.13. Keterpaduan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman				
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.14.5	Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan				
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

600.1.15.5 Kelembagaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.1.15.5	Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.16.5	Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman				
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	Biasa/Terbuka			
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	Biasa/Terbuka			
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

600.1.17.5 Kelembagaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.1.17.5	Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.2	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**				
	600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan				
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.2.3	Kemitraan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan				
	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan				
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

600.2.4.2 Sumber Pembiayaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan				
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.5.2	Analisa Teknik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.6	Penyediaan Rumah Susun				
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.6.2	Penyediaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

600.2.6.4 Pengelolaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.2.6.4	Pengelolaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus				
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial				
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

600.2.8.4 Fasilitasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.9	Investasi Infrastruktur				
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.10.4	Manajemen Mutu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi				
	600.2.11.1	Kelembagaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

600.2.11.2 Material ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi				
	600.2.14.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

600.2.14.2 Pelaksanaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi				
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.15.2	Pengembangan Materi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)				
	600.2.16.1	Antar Sektor	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.16.2	Antar Wilayah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis				
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan				
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait

600.2.18.5 Sinkronisasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3	**TATA RUANG (TATA KOTA)**				
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.3.2	Perencanaan				
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.4	Pemetaan				
	600.3.4.1	Peta Dasar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4	**LINGKUNGAN HIDUP**				
	600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
	600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.4	Ekonomi Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.5	Dampak Lingkungan				
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkung	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan				
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan				
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan				
	600.4.8.1	Pengembangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.8.2	Pemanfaatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.8.4	Keamanan Hayati	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat				
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.9.2	Rawa	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer				
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim				
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun				
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun				
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait

600.4.13.3 Penimbunan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3				
	600.4.14.1	Pemantauan dan pemulihan Kontaminasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.14.2	Tanggap darurat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.15	Pengelolaan Sampah				
	600.4.15.1	Pembatasan sampah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan				
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan				
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan				
	600.4.18.1	Penyidikan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolahan terkait
	600.4.19	Komunikasi Lingkungan				
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat				

600.4.20.1 Komunitas Pendidikan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat				
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan				
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan				
	600.4.23.1	Pengelolaan Data	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.24	Kelembagaan Lingkungan				
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.25	Standarisasi dan teknologi				
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
	600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolahan terkait
	700	**PENGAWASAN**				
	700.1	**PENGAWASAN INTERNAL**				
	700.1.1	Rencana Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawasan Tahunan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

700.1.1.3 Rencana Kinerja ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan				
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800	**KEPEGAWAIAN**				
	800.1	**SUMBER DAYA MANUSIA**				
	800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
	800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

800.1.1.2 Perenecanaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai				
	800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.3	Mutasi Pegawai				
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN.	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

800.1.3.3 Pengangkatan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/ Fungsional	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.4	Pengembangan Karir				
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara				
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

800.1.5.2 Pengelolaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	800.1.5.2	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN dan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.6.2	Disiplin	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.7	Bantuan Hukum	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait

800.1.8 Status dan Kedudukan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai				
	800.1.8.1	Status Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian				
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.10	Pengawasan dan pengendalian				

800.1.10.1 Formasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.11	Administrasi Pegawai				
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.2	Cuti Sakit	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.3	Cuti Bersalin	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.4	Cuti Tahunan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

800.1.11.5 Cuti Alasan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.6	Cuti Besar	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.12	Kesejahteraan Pegawai				
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.4	Bantuan Sosial	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

800.1.12.5 Pakaian Dinas ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	800.1.12.5	Pakaian Dinas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.12.10	Rekam Medis	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.13	Administrasi Perseorangan				
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.1.14	Penilaian Kompetensi				
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

800.1.14.2 Hasil Penilaian ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	800.2	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan				
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.4	Modul-modul diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.5	Panduan fasilitator	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3	Widyaiswara				
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

800.2.4.3 Konsultasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.5	Alumni	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900	**KEUANGAN**				
	900.1	**KEUANGAN DAERAH**				
	900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)				
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.2	Penyusunan Anggaran				
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3	Pelaksanaan Anggaran				
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.2	Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.3	Belanja	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

900.1.3.7 Daftar Gaji ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	900.1.3.7	Daftar Gaji	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.8	Kartu Gaji	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.10	Laporan Keuangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri				
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.11	Report / Laporan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.13	Completion Report/Annual Report	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan /Triwulanan /Semesteran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan				
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar PembukuanPencairan/Pengeluarn (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan				
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait
	900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

900.1.10 Pelaksanaan ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu				
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah				
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Biasa/Terbuka	Publik	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.12	Anggaran Daerah				
	900.1.12.1	Anggaran Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah				
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

900.1.13.5 Pinjam dan Obligasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah.	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.13.6	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah.	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan				
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				
	900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi ...

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolahan
1	2	3	4	5	6	7
	900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah.	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.	Terbatas	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Takengon, MARET 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA